



Menuju Keberlanjutan Lingkungan: Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Kota Batam

Eva Lesna Nainggolan¹, Karol Teovani Lodan², Lubna Salsabila³

¹²³ Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

pb191010040@upbatam.ac.id karol@puterabatam.ac.id lubna.salsabila@puterabatam.ac.id

Received : July 5, 2023; Accepted : Oct 27, 2023

DOI 10.25299/jiap.2023.13584

Abstract

Community engagement is essential for successful development initiatives and rural empowerment. This study aims to analyze community participation in an empowerment program in Batam City. It assesses current circumstances and factors influencing long-term community empowerment. Using qualitative research, the study focuses on the challenge of informing residents about local regulation No. 11 of 2013, given the city's growing population. The study finds that existing information dissemination methods, such as print and electronic media, fall short in reaching newcomers to the city. Despite efforts by Batam City Environment Service, public awareness of environmental cleanliness remains inadequate due to a lack of community attachment. To address waste management issues, it's crucial to emphasize the importance of Regional Regulation Law No. 11 of 2013, which addresses these concerns comprehensively. The study highlights the significance of ongoing socialization programs by Batam City Environment Service in improving the program's effectiveness. It underscores the need for tailored strategies to foster a shared sense of environmental responsibility among Batam City's residents.

Key Words : *Community participation; Rural community development; Waste management*

Abstrak

Keterlibatan aktif anggota masyarakat sangat penting untuk memastikan keberhasilan inisiatif pembangunan dan pemberdayaan komunitas pedesaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, dengan tujuan menilai situasi yang ada dan mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh yang berkontribusi pada kelangsungan usaha pemberdayaan komunitas jangka panjang. Menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang ditandai oleh orientasi deskriptif, penelitian ini berfokus pada Kota Batam, sebuah lokasi yang menghadapi tugas rumit dalam menyebarkan informasi tentang regulasi lokal No. 11 tahun 2013 kepada penduduknya, yang lebih sulit karena pertumbuhan penduduk kota yang pesat. Penelitian ini menemukan bahwa metode penyebaran informasi yang ada, seperti media cetak dan elektronik, kurang efektif dalam mencapai audiens target yang terdiri dari pendatang baru ke kota tersebut. Menurut temuan Dinas Lingkungan Kota Batam, meskipun upaya sosialisasi yang konsisten dan tekun, tingkat kesadaran masyarakat tentang kebersihan lingkungan di wilayah tersebut masih tidak memadai. Fenomena yang diamati dapat disebabkan oleh kurangnya keterlibatan penduduk Kota Batam dalam mengembangkan rasa afiliasi dengan lingkungannya. Untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah yang rumit ini, penting untuk menekankan pentingnya Undang-Undang Regulasi Regional No. 11 tahun 2013. Undang-undang khusus ini, yang berjudul "Pengelolaan Sampah," menyajikan solusi komprehensif dan menyeluruh terhadap masalah tersebut. Penelitian ini menjelaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dan menegaskan kebutuhan akan strategi yang disesuaikan untuk membentuk kesadaran kolektif akan tanggung jawab lingkungan di antara penduduk Kota Batam.

Key Words : *Partisipasi Masyarakat; Pengembangan masyarakat pedesaan; Pengelolaan sampah*

Pendahuluan

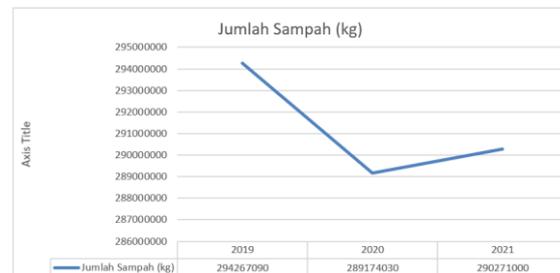
Pentingnya partisipasi masyarakat dalam keberhasilan dan kesinambungan program dan prakarsa pembangunan, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat pedesaan, diakui secara luas (Wang, 2014). Keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan memikul tanggung jawab atas upaya pengembangan mereka memiliki potensi untuk menghasilkan hasil yang lebih efektif dan memupuk efek positif yang bertahan lama dalam jangka waktu yang lama (Daley, 2008). Partisipasi masyarakat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara individu. Ketika anggota masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam inisiatif lingkungan, mereka mengembangkan hubungan pribadi dan kepentingan dalam kesejahteraan lingkungan mereka (Bryson et al., 2012). Rasa kepemilikan ini memotivasi mereka untuk mengambil tindakan, apakah itu mengadopsi praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, berpartisipasi dalam upaya konservasi, atau mengadvokasi kebijakan lingkungan.

Partisipasi masyarakat membawa beragam perspektif dan pengetahuan ke meja (Rowe & Frewer, 2000). Setiap komunitas itu unik, dengan seperangkat masalah lingkungan, nilai budaya, dan keahlian lokalnya sendiri (Lukensmeyer et al., 2011). Dengan melibatkan masyarakat, gagasan dan wawasan yang lebih luas dapat dikumpulkan, yang mengarah pada solusi yang lebih komprehensif dan spesifik konteks. Pengetahuan lokal, yang diwariskan dari generasi ke generasi, seringkali menyimpan wawasan berharga tentang praktik berkelanjutan dan kearifan ekologi tradisional yang dapat

berkontribusi pada pengelolaan lingkungan yang efektif.

Selanjutnya, partisipasi masyarakat membantu membangun modal sosial dan memperkuat kohesi sosial (Sinclair & Diduck, 2017). Tantangan lingkungan sangat kompleks dan membutuhkan upaya kolaboratif untuk mengatasi secara efektif. Ketika anggota komunitas berkumpul untuk mengatasi masalah ini, mereka membentuk jaringan sosial, menjalin hubungan, dan memupuk rasa solidaritas. Koneksi ini menciptakan landasan yang kuat untuk tindakan kolektif, yang memungkinkan masyarakat memobilisasi sumber daya, berbagi tanggung jawab, dan menerapkan inisiatif berkelanjutan secara lebih efektif.

Gambar 1.
Jumlah Sampah di Kota Batam 2019-2021



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam 2021

Dalam konteks Kota Batam, masalah pengelolaan sampah menjadi isu yang krusial. Jumlah sampah yang terus meningkat secara drastis memperumit proses pengangkutan sampah di kota ini (Buchy & Hoverman, 2000). Pada periode sebelumnya, terjadi kendala dalam penanganan sampah yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara tonase sampah yang dihasilkan dan jumlah armada pengangkut yang tersedia. Situasi ini mencerminkan perlunya langkah-

langkah konkret dalam pengelolaan sampah di Kota Batam.

Persoalan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masyarakat di Batam merupakan tantangan yang cukup besar, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai variabel. Populasi tertentu mungkin lebih menyukai sistem pembuangan sampah konvensional karena norma budaya dan adat istiadat, sehingga menimbulkan kesulitan dalam mendorong perubahan perilaku. Selain itu, kurangnya informasi mengenai dampak lingkungan dan kesehatan dari pembuangan sampah yang tidak tepat dapat menyebabkan sikap apatis di kalangan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat terhambat oleh berbagai faktor, termasuk terbatasnya sumber daya yang dialokasikan untuk pendidikan masyarakat dan inisiatif kesadaran, tantangan bahasa, dan kesenjangan sosial ekonomi. Untuk memfasilitasi penyelesaian hambatan-hambatan ini dan mendorong keterlibatan masyarakat, strategi holistik sangat penting. Pendekatan ini harus mencakup kesadaran budaya, alokasi sumber daya yang memadai untuk tujuan pendidikan dan komunikatif, dan pembentukan inisiatif pengelolaan sampah yang adil dan dapat diakses oleh individu dari latar belakang sosial ekonomi dan warisan budaya yang beragam.

Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dalam pengelolaan sampah, termasuk meningkatkan infrastruktur pengangkutan sampah, mengurangi sampah di sumbernya, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan melibatkan masyarakat dalam program edukasi dan kesadaran lingkungan, serta menggalang dukungan komunitas untuk upaya daur ulang dan pengurangan sampah, dapat

tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi dampak negatif dari peningkatan jumlah sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis signifikansi keterlibatan masyarakat dalam mendukung inisiatif pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, dengan penekanan khusus pada wilayah perkotaan Kota Batam.

Tinjauan Pustaka

Partisipasi Masyarakat

Pelaksanaan pembangunan yang melibatkan seluruh anggota masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan dan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh Tjokroamidjodjo (1974) yang dikutip oleh Supriyadi (2010). Cohen dan Uphoff (1977) membagi partisipasi masyarakat dalam beberapa tahapan yang meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, menikmati hasil, dan evaluasi. Pertama, tahap pengambilan keputusan melibatkan partisipasi masyarakat dalam rapat-rapat dan perencanaan kegiatan (Cohen & Dan Uphoff, 1997). Partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dengan memberikan pemikiran dan masukan dalam perencanaan pembangunan.

Kedua, tahap pelaksanaan merupakan inti dari pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam tahap ini terwujud dalam bentuk sumbangan pemikiran, materi, dan tindakan sebagai anggota program (Harrison & Sayogo, 2014). Melalui partisipasi ini, masyarakat aktif terlibat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Ketiga, tahap menikmati hasil menjadi indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada

tahap perencanaan dan pelaksanaan program (Radtke et al., 2018). Dalam posisi sebagai subyek pembangunan, semakin besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari program pembangunan, maka program tersebut dapat dianggap berhasil. Keempat, tahap evaluasi dianggap penting karena partisipasi masyarakat pada tahap ini memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang. Evaluasi ini membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan berdasarkan masukan dan pengalaman yang diperoleh dari masyarakat.

Partisipasi publik dalam konteks pengelolaan sampah di negara berkembang, terutama Indonesia, merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan serta program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Hal ini melibatkan individu, komunitas, dan organisasi masyarakat dalam berbagai aktivitas yang terkait dengan pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan sampah, pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga penggunaan kembali atau daur ulang. Partisipasi publik dalam pengelolaan sampah sangat penting karena melibatkan pemangku kepentingan utama, yaitu masyarakat itu sendiri.

Partisipasi publik melibatkan masyarakat dalam semua tingkatan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah, baik dalam perencanaan, implementasi, maupun pemantauan kebijakan dan program (Ako, 2017). Masyarakat diundang untuk berperan aktif dalam menentukan solusi, memberikan masukan, dan berbagi tanggung jawab dalam pengelolaan sampah (Yang & Pandey, 2011).

Partisipasi publik juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan dampaknya terhadap lingkungan dan Kesehatan. Pendidikan yang terfokus pada pemahaman tentang sumber daya alam, daur ulang, dan praktik berkelanjutan juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Pangestu (1995), partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

- a. Faktor internal melibatkan karakteristik individu yang dapat memengaruhi kecenderungan individu untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu tersebut mencakup faktor seperti usia, tingkat pendidikan, tanggungan keluarga, pendapatan, dan pengalaman dalam berkelompok.
- b. Faktor eksternal mencakup hubungan antara pengelola proyek dengan sasaran yang dapat memengaruhi partisipasi. Jika pengelola proyek memberikan respons yang positif dan menguntungkan kepada sasaran, mereka akan cenderung terlibat secara sukarela dalam proyek tersebut. Selain itu, pelayanan yang positif dan sesuai yang diberikan oleh pengelola kegiatan juga dapat mempengaruhi partisipasi sasaran dalam proyek.

Selain faktor-faktor tersebut, terdapat pula faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat, sebagaimana yang disampaikan oleh Watson dalam Soetomo (2008). Salah satu kendala yang dapat menghambat terjadinya perubahan adalah ketergantungan individu (Carrera et al., 2017). Ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi hambatan

dalam mencapai partisipasi atau keterlibatan aktif masyarakat (Yandra, 2016). Rasa ketergantungan ini mengakibatkan kurangnya inisiatif dari masyarakat untuk melaksanakan pembangunan atau mengambil langkah inisiatif sendiri.

Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tahapan, mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi. Partisipasi ini memungkinkan masyarakat untuk memiliki keterlibatan yang lebih besar, merasakan manfaat dari pembangunan, dan memberikan masukan berharga untuk perbaikan dan pengembangan program pembangunan selanjutnya.

Sistem Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah melibatkan segala kegiatan yang dilakukan dalam mengatasi sampah dari awal terbentuknya hingga saat pembuangan akhir. Secara keseluruhan, proses pengelolaan sampah melibatkan langkah-langkah seperti pengendalian produksi sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transportasi, pengolahan, serta pembuangan akhir (Kartikawan, 2007 dalam Alfiandra, 2009).

Secara umum, pengelolaan sampah melibatkan serangkaian tahapan kegiatan. Tahapan-tahapan ini termasuk dalamnya pembentukan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengemasan, pengumpulan, dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang sesuai (Sutinah Andaryani et al., 2023). Apabila salah satu tahapan kegiatan ini mengalami kendala atau tidak terlaksana dengan

baik, dapat menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Pentingnya pengelolaan sampah yang terintegrasi dan terencana adalah untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat (Nugroho et al., 2021). Apabila salah satu tahapan dalam pengelolaan sampah tidak berfungsi dengan baik, seperti kurangnya efektivitas pengumpulan atau kurangnya fasilitas pengolahan yang memadai, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, dan kerugian ekonomi.

Dalam konteks pengelolaan sampah di negara berkembang seperti Indonesia, partisipasi publik memiliki peran penting (Chanhthamixay et al., 2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah melibatkan kesadaran, pengetahuan, dan tindakan individu maupun kelompok dalam mengurangi, memilah, dan mengelola sampah secara bertanggung jawab. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui pendidikan, kesadaran lingkungan, dan partisipasi dalam program daur ulang atau kegiatan pengelolaan sampah lainnya, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif dalam metode penelitian kualitatif (Sujarweni, 2021). Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan panduan penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa teks, ucapan, dan perilaku individu yang menjadi objek penelitian (Brandler & Roman, 2020; Nahid, 2003). Dalam penelitian kualitatif, tujuannya adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang

tulisan, ucapan, atau tindakan yang dapat diamati dari individu, masyarakat, dan organisasi dalam konteks yang relevan.

Peneliti menggunakan dua jenis sumber data dalam penelitian ini seperti yang diungkapkan oleh Sujarweni (2021:73), yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, seperti melalui interaksi dengan informan yang terlibat (Burnard et al., 2008). Dalam rangka ini, penelitian ini melibatkan 30 responden yang dipilih secara acak dengan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data utama. Pemilihan responden secara acak dilakukan dengan mengambil sampel yang mencakup beragam kelompok masyarakat di Batam, termasuk warga yang tinggal di berbagai wilayah kota dan latar belakang sosial yang berbeda. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pandangan dan pengalaman individu terkait keterlibatan mereka dalam pengelolaan sampah serta untuk memahami peran masyarakat dalam mencapai keberlanjutan lingkungan. Analisis data kualitatif akan digunakan untuk mengidentifikasi temuan kunci dan pola-pola yang muncul dalam wawancara responden, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Batam. Sementara itu, data sekunder merujuk pada data yang diambil dari buku, artikel, catatan, jurnal, penelitian sebelumnya, dan data statistik yang diperoleh dari Kantor Kepegawaian Daerah Kota Batam. Dengan memanfaatkan kedua jenis data ini, penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan informasi yang komprehensif dan terpercaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Hasil dan Pembahasan

Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dan kesadaran individu atau kelompok dalam kegiatan yang bertujuan tertentu (Nurcahyo, 2018; Pamungkas & Hanathasia, 2016). Program partisipasi ini seharusnya melibatkan seluruh proses mulai dari awal hingga tahap akhir. Partisipasi merupakan tindakan konkret untuk ikut serta dalam kegiatan guna mendapatkan manfaat. Dalam konteks pengelolaan sampah di bank sampah, partisipasi masyarakat sangat penting karena dibutuhkan kesadaran dan kerjasama masyarakat agar sampah tidak lagi tersebar dan lingkungan yang bersih dan sehat dapat tercipta.

Penduduk Kota Batam terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh urbanisasi yang berlangsung dengan cepat. Tidak dapat disangkal bahwa Batam, sebagai kota industri, memiliki daya tarik sendiri bagi pendatang yang ingin menetap di Kota Batam. Dampak dari peningkatan jumlah penduduk ini adalah mempengaruhi efektivitas sosialisasi peraturan daerah (perda) itu sendiri. Berikut ini adalah gambaran mengenai jumlah penduduk di Kota Batam:

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Kota Batam

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Belakang Padang	12.405	10.034	22.439
Bulang	5.616	5.091	10.707
Galang	8.998	7.991	16.989
Sungai Beduk	48.584	47.609	96.193
Saguhung	108.359	101.027	209.386
Nongsa	42.380	39.071	81.451
Batam Kota	99.067	99.550	198.617
Sekupang	79.153	77.130	156.283
Batu Aji	70.874	68.638	139.512
Lubuk Baja	41.919	42.614	84.533
Batu Ampar	31.215	29.235	60.450
Bengkong	60.829	59.007	119.836
KOTA BATAM	609.399	586.997	1.196.396

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batam

Karena pertumbuhan populasi tahunan yang eksponensial di Kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup Kota menghadapi tantangan dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2013 secara efektif kepada penduduk setempat. Informasi yang diberikan kurang komprehensif dalam menyikapi masalah pendatang baru di Kota Batam. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam telah melakukan inisiatif sosialisasi melalui berbagai platform media, baik media cetak maupun elektronik. Namun, telah diamati bahwa upaya ini belum membuahkan hasil yang optimal dalam hal keterlibatan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Terlepas dari pertemuan-pertemuan penjangkauan rutin, telah menjadi perhatian pihak berwenang bahwa masih ada kekurangan yang mencolok dalam tingkat kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Fenomena yang diamati dapat dikaitkan dengan tidak adanya sentimen afiliasi yang berlaku terhadap lingkungan lokal dalam populasi Kota Batam.

Sejak saat itu, tingkat kesadaran dan ketakutan memainkan peran penting dalam menegakkan lingkungan ekologis yang utuh di dalam batas-batas Kota Batam. Berdasarkan analisis terhadap efektifitas upaya sosialisasi Perda No. 11 Tahun 2013, terlihat bahwa meskipun telah diupayakan berulang kali, hasil yang diharapkan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, hijau, asri, dan nyaman di Kota Batam belum tercapai secara substansial. Menurut data yang ada, telah ditentukan bahwa Kota Batam yang terdiri dari 9 kecamatan menghasilkan perkiraan keluaran sampah setiap hari sekitar 1.114 ton. Produksi sampah ini terkait dengan total populasi sekitar 1.200.000 orang yang tinggal di

kecamatan tersebut. Berdasarkan temuan dari lembaga penelitian, telah ditentukan bahwa rata-rata timbulan sampah per orang per hari adalah sekitar 0,7 kg, terlepas dari letak geografisnya. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda No. 11 Tahun 2013, pengelolaan dan pengurangan sampah tunduk pada regulasi. Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, setiap warga negara wajib menyediakan dan memelihara wadah yang sesuai untuk pembuangan bahan limbah. Namun, telah menjadi perhatian pihak berwenang bahwa sebagian besar masyarakat tidak mematuhi pedoman yang ditentukan terkait dengan penggunaan tempat sampah yang benar tersebut. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam memiliki armada khusus pembuangan limbah sebanyak 119 armada dan mempekerjakan 755 pekerja.

Pengelolaan sampah di wilayah hukum Kota Batam dilaksanakan secara efektif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Kawasan tersebut secara efektif dibagi menjadi tiga zona berbeda, yaitu Batam Barat, Batam Timur, dan Bareleng, yang meliputi Rempang dan Galang Pulau. Di zona kedua, operasi pengelolaan sampah pada awalnya dilakukan oleh entitas pihak ketiga dalam upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta. Menyusul penilaian komprehensif terhadap praktik pengelolaan sampah di Kota Batam, terlihat bahwa sejak 2017, tanggung jawab pengelolaan sampah di semua kecamatan telah dipikul oleh otoritas kecamatan masing-masing. Namun, penting untuk dicatat bahwa operasi pengelolaan sampah di wilayah pulau Batam saat ini dikelola oleh pihak ketiga.

Proses pengelolaan sampah yang mengikuti standar penanganan kontemporer, khususnya sistem pengelolaan sampah terpadu, meliputi

koordinasi strategis kegiatan pengelolaan sampah dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan perkotaan. Penelaahan terhadap berbagai dimensi yang saling terkait, termasuk namun tidak terbatas pada ekonomi, lingkungan, sosial dan kelembagaan, politik, keuangan, dan teknis, dilakukan secara komprehensif. Pendekatan holistik ini memastikan partisipasi aktif semua pihak terkait dalam perumusan rencana dan proses pengambilan keputusan (Manalu & Purba, 2020). Tingkat partisipasi masyarakat berfungsi sebagai metrik penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencapai hasil yang diinginkan dari kebijakan pemerintah tidak dapat dilebih-lebihkan.

Implementasi bank sampah di setiap RT/RW telah memberikan hasil yang baik dengan menghasilkan pendapatan tambahan bagi individu yang tinggal di setiap kecamatan yang rajin dan akurat melakukan praktik pengelolaan sampah. Pemerintah disarankan untuk terus mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung efektivitas kebijakan melalui penyediaan informasi yang mudah dipahami dan inisiatif sosialisasi kepada masyarakat luas. Diharapkan akan ada peningkatan kesadaran masyarakat secara organik tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menerapkan praktik pengelolaan sampah yang efektif. Sangat penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa setiap kebijakan yang diberlakukan dirancang dengan tujuan menyeluruh untuk memajukan kesejahteraan kolektif mereka.

Kesimpulan

Inisiatif keterlibatan komprehensif harus mencakup keseluruhan rangkaian prosedural, dimulai dari fase inisiasi dan berpuncak pada tahap finalisasi, dengan tujuan utama mendorong pembentukan lingkungan yang bersih dan sehat. Pertambahan jumlah penduduk Kota Batam secara eksponensial berdampak nyata pada efektifitas peraturan daerah yang berlaku, khususnya Perda No. 11 Tahun 2013. Terlepas dari inisiatif sosialisasi sebelumnya, ternyata masih ada kekurangan yang mencolok dalam kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan. Kekurangan ini dapat dikaitkan dengan tidak adanya sentimen kolektif keterikatan dan tanggung jawab terhadap lingkungan dalam masyarakat. Untuk selanjutnya, kesadaran dan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan sebagai prinsip utama dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Dalam bidang pengelolaan sampah, pemanfaatan bank sampah di masing-masing daerah telah diamati memberikan hasil yang menguntungkan dengan menghasilkan pendapatan tambahan bagi penduduk setempat. Pemerintah disarankan untuk terus mengoptimalkan peran masyarakat dengan memastikan penyediaan informasi yang mudah dipahami dan melakukan kegiatan sosialisasi. Sangat penting bahwa masyarakat umum menunjukkan peningkatan kesadaran yang melekat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan menerapkan praktik pengelolaan limbah yang efektif. Singkatnya, sangat penting untuk menekankan bahwa pencapaian tujuan pengelolaan sampah yang sukses dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan bergantung pada elemen penting dari partisipasi aktif dan kesadaran masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ako, J. N. (2017). *Participatory Development: A study of community and citizen participation in development and policymaking in Stockholm, Värmdo and Bortkyrka municipalities in Sweden*.
- Brandler, S., & Roman, C. P. (2020). Qualitative Research Methods. In *Handbook of Research Methods in Public Administration*. <https://doi.org/10.1201/9781420013276-17>
- Bryson, J. M., Quick, K. S., & Crosby, B. C. (2012). *Designing Public Participation Processes: Theory to Practice*. 73, 23–34. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02678.x>. Designing
- Buchy, M., & Hoverman, S. (2000). Understanding public participation in forest planning: A review. *Forest Policy and Economics*, 1(1), 15–25. [https://doi.org/10.1016/s1389-9341\(00\)00006-x](https://doi.org/10.1016/s1389-9341(00)00006-x)
- Burnard, P., Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Analysing and presenting qualitative data. *British Dental Journal*, 204(8), 429–432. <https://doi.org/10.1038/sj.bdj.2008.292>
- Carrera, L. B., Warren, A., Beek, E. Van, Jonoski, A., & Giardino, A. (2017). Collaborative modelling or participatory modelling? A framework for water resources management. *Environmental Modelling and Software*, 91, 95–110. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2017.01.014>
- Chanthamixay, B., Vassanadumrongdee, S., & Kittipongvises, S. (2017). Assessing the Sustainability Level of Municipal Solid Waste Management in Bangkok, Thailand by Wasteaware Benchmarking Indicators. *Applied Environmental Research*, 49–61. <https://doi.org/10.35762/aer.2017.39.3.6>
- Cohen, J. M., & Dan Uphoff, N. T. (1997). *Rural Development Participation, RD CCIS*. Cornell University Press.
- Daley, D. M. (2008). Public participation and environmental policy: What factors shape state agency's public participation provisions? *Review of Policy Research*, 25(1), 21–35. <https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2007.00307.x>
- Harrison, T. M., & Sayogo, D. S. (2014). Transparency, participation, and accountability practices in open government: A comparative study. *Government Information Quarterly*, 31(4), 513–525. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2014.08.002>
- Lukensmeyer, C. J., Goldman, J., & Stern, D. (2011). Assessing public participation in an open government era. *IBM Center for the Business of Government*. Available at: <http://www.govexec.com/Pdfs/082211jm1.Pdf>
- Nahid, G. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. *The Qualitative Report*, 8(4), 597–607. <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR8-4/golafshani.pdf>
- Nugroho, R. A., Rahmawati, A. A., Prakoso, S. G., Nurhaeni, I. D. A., Kartinawanty, A. T., & Parwiyanto, H. (2021). Policy issues on covid-19 waste: Comparing Indonesia and Taiwan. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 905(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/905/1/012113>
- Nurchahyo, A. (2018). Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 6(01), 25. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v6i01.878>

- Pamungkas, B., & Hanathasia, M. (2016). *Partisipasi Publik Via Teknologi Aplikasi : Solusi Qlue Menyambungkan Aspirasi Warga Jakarta*. 699–711.
- Radtke, J., Holstenkamp, L., Barnes, J., & Renn, O. (2018). Concepts, Formats, and Methods of Participation: Theory and Practice. *Handbuch Energiewende Und Partizipation*, 21–42. https://doi.org/10.1007/978-3-658-09416-4_2
- Rowe, G., & Frewer, L. J. (2000). Public participation methods: A framework for evaluation. *Science Technology and Human Values*, 25(1), 3–29. <https://doi.org/10.1177/016224390002500101>
- Sinclair, A. J., & Diduck, A. P. (2017). Reconceptualizing public participation in environmental assessment as EA civics. *Environmental Impact Assessment Review*, 62, 174–182.
- Sutinah Andaryani, Dwikurniawati, I. U., & Rusdi, R. (2023). Pelaksanaan Pengolahan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1). [https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9\(1\).12551](https://doi.org/10.25299/jiap.2023.vol9(1).12551)
- Wang, X. (2014). *Assessing Public Participation*. 24(4), 322–336. <https://doi.org/10.2307/3381222>
- Yandra, A. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Pekanbaru 2012-2017. *Alexsander Yandra PUBLIKA*, 2(1).
- Yang, K., & Pandey, S. K. (2011). Further Dissecting the Black Box of Citizen Participation: When Does Citizen Involvement Lead to Good Outcomes? *Public Administration Review*, 71(6), 880–892. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02417.x>